

**PEMISAHAN PERSEROAN SEBAGAI BENTUK RESTRUKTURISASI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

Miranda Fitraya¹, Abdul Rachmad Budiono², Bambang Sugiri³

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898, Fax. (0341) 566505.
Email : mirandafitraya@ymail.com

Abstract

The Corporate Separation was a new stipulation within the new Limited Corporate Act which was not recognized in the old new Limited Corporate Act. In banking sector, the term "Separation" was revived within Syariah Banking Act. The method of Corporate Separation within Limited Corporate Act and Syariah Banking Act was similar despite few differences. Considering this matter as research background, the author was attempting to discuss about the Mechanism of Corporate Separation for Business Restructuring with Limited Corporate Act and Syariah Banking Act, and also to understand Law Consequence of Corporate Separation for Business Restructuring with Law No.40/2007 about Limited Corporate and Law No.21/2008 about Syariah Banking. Research type was normative. The method to collect law materials was literature study by which data were collected by reviewing some literatures such as laws and regulation, magazines, documents, internet pages, books, language dictionaries, law dictionaries, and other materials relevant to research title. By taking account the result of research, the mechanism of corporate separation in Syariah Banking Act had been arranged within Bank Indonesia's Regulation. However, Limited Corporate Act did not explain the detail of mechanism and procedure of corporate separation, and therefore, the government should design the separated implementing regulation for Corporate Separation. Law consequence of Corporate Separation with Limited Corporate Act and Syariah Baking Act could be observed on the method of separation, whether the separation used Genuine-Separation or Quasi-Separation.

Key words: corporate separation, limited corporate, syariah banking

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Dosen Pembimbing I.

³ Dosen Pembimbing II.

Abstrak

Pemisahan Perseroan merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama. Sementara itu di bidang Perbankan, istilah pemisahan ini baru disebutkan kembali dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Kedua cara Pemisahan Perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki adanya suatu persamaan, selain itu juga memiliki perbedaan. Berdasarkan masalah diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat masalah membahas mengenai Mekanisme Pemisahan Perseroan dalam hal Restrukturisasi yang diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Apa Akibat Hukum Pemisahan Perseroan dalam hal Restrukturisasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme beserta akibat hukum pemisahan perseroan. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah Normatif. dan Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan yakni pengumpulan data yang diperlukan dengan melakukan penelaahan kepustakaan melalui Peraturan Perundang-undangan, majalah, literatur, internet, buku-buku, kamus bahasa, kamus hukum dan bahan kepustakaan lainnya terkait masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemisahan perseroan berdasarkan undang-undang perbankan syariah ternyata sudah diatur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia, namun berkaitan dengan tindakan korporasi Pemisahan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas belum diatur secara rinci mengenai prosedur dan mekanismenya sehingga disarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana tersendiri yang mengatur Pemisahan. Akibat Hukum Pemisahan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dilihat dari cara pemisahan yang dilakukan, apakah memakai Pemisahan Murni atau Pemisahan Tidak Murni.

Kata kunci: pemisahan perseroan, perseroan terbatas, perbankan syariah

Latar Belakang

Dalam waktu tertentu suatu perusahaan memerlukan suatu restrukturisasi atau reorganisasi dalam tahap-tahap tertentu. Apabila perusahaan tersebut menginginkan perusahaannya dapat bersaing dengan perusahaan lain baik ditingkat

nasional maupun internasional, maka perusahaan tersebut perlu melakukan suatu restrukturisasi.⁴

Restrukturisasi perusahaan tidak hanya mengangkut aspek bisnis, tetapi juga menyangkut usaha, manajemen, organisasi, keuangan, maupun aspek hukumnya. Restrukturisasi usaha adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya kompetensi, daya saing, dan cara yang dapat dilakukan untuk restrukturisasi.⁵

Restrukturisasi perusahaan berarti perusahaan melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis perusahaan yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetisi, ini berarti tidak semata-mata untuk menjadikan perusahaan tersebut tetap eksis namun juga dapat memenuhi tuntutan pasar.

Seiring berkembangnya dunia usaha dan meluasnya kegiatan usaha dalam suatu Perseroan Terbatas, maka melakukan pemisahan beberapa usaha atau pemisahan dalam satu Perseroan Terbatas menjadi lebih dari satu Perseroan Terbatas merupakan efisiensi usaha untuk mengejar laba yang lebih maksimal. Pemisahan dapat menjadi pilihan bagi pengusaha untuk memisahkan satu ataupun beberapa kegiatan usaha yang dilakukan suatu Perseroan Terbatas ke dalam Perseroan Terbatas yang menerima Pemisahan. Pemisahan juga dapat mengurangi resiko usaha pada Perseroan Terbatas sebagai akibat meluasnya kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.⁶

Walaupun demikian, pelaku usaha tidak cukup hanya melihat sisi positif dari pemisahan Perseroan Terbatas. Konsep Pemisahan dan sejauh mana pengaturan hukum yang diberikan harus dicermati oleh pelaku usaha serta dibutuhkan suatu pemahaman untuk menghindari resiko bisnis, dikarenakan pengaturan masalah Pemisahan ini merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas yang lama hanya

⁴ Ridwan Khairandy, **Perseroan Terbatas doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi**, Kreasi Tital Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 279.

⁵ *Ibid.*, hlm. 280.

⁶ Sandi Suwardi, **Pemisahan Usaha dalam Kerangka UUPt**, <http://sandi-suwardi.blogspot.com/2009/02/pemisahan-usaha-dalam-kerangka-uu-pt.html>, diakses 11 Februari 2015 pukul 09.00 WIB.

mengatur masalah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, tetapi belum mengatur masalah Pemisahan Perseroan ini.

Sementara itu, dalam tesis ini akan lebih fokus membahas mengenai restrukturisasi perusahaan dengan cara pemisahan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan. Praktek Pemisahan telah cukup jauh dikenal sebagai salah satu konstruksi hukum yang banyak digunakan dalam melakukan restrukturisasi perusahaan, namun dalam industri perbankan konstruksi hukum ini baru diatur dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Menurut Pasal 16 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa unit usaha syariah dapat menjadi suatu Bank Umum Syariah yang berdiri sendiri setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari Bank Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara sukarela Bank Umum Konvensional yang telah memberikan layanan syariah dapat melakukan pemisahan Unit Usaha syariah untuk dijadikan sebagai Bank Umum Syariah yang merupakan Bank Umum Mandiri.

Pada dasarnya, Pengembangan Perbankan Syariah nasional merupakan program dari Restrukturisasi Perbankan Nasional. Pertama, Untuk memenuhi adanya kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang mana tidak dapat menerima adanya konsep bunga. Kedua, dapat membuat terciptanya *Dual Banking System* yang dapat mengakomodasi Perbankan konvensional maupun perbankan syariah, sehingga melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, ketiga. Ketiga, mengurangi adanya resiko sistematis dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia, Keempat, mendorong peran Perbankan dalam hal membatasi kegiatan yang tidak produktif pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai normal.⁷

Disebutkan definisi Pemisahan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pemisahan yaitu pemisahan usaha dari 1 (satu) Bank menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁸. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam Undang-

⁷ Ali Rama, **Proyeksi Perbankan Syaria**h 2012, <http://zonaekis.com/proyeksi-perbankan-syariah-2012/>, diakses 7 Februari 2012 pukul 09.30 WIB.

⁸ Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang **Perbankan Syariah**.

Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 12 UUPT disebutkan bahwa definisi Pemisahan yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usahanya yang mengakibatkan keseluruhan dari aktiva maupun pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan ataupun lebih, ataupun sebagian dari aktiva maupun pasiva suatu Perseroan yang beralih karena hukum kepada 1(satu) Perseroan ataupun lebih.⁹

Bila dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan baru hasil Pemisahan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan secara tegas bahwa bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, perusahaan baru hasil pemisahan tersebut tidak disebutkan secara tegas bentuk hukumnya, melainkan hanya disebutkan menjadi 2 (dua) badan usaha atau lebih. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, bentuk hukum dari badan usaha baru hasil pemisahan suatu Bank tidak harus mengikuti ataupun sama dengan bentuk hukum perusahaan asal sebelum dipisah. Apabila dilihat dari kegiatan usahanya bahwa badan usaha baru hasil pemisahan tersebut adalah Bank Syariah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan Syariah, badan usaha baru tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Dapat ditarik dua kemungkinan pemisahan Perseroan yang dimaksud, yaitu pemisahan Perseroan dengan tetap mempertahankan entitas hukum yang lama dan memunculkan satu atau lebih entitas hukum baru. Sedangkan kemungkinan lain adalah pemisahan perseroan menghapuskan entitas hukum yang lama dan memunculkan dua atau lebih entitas hukum yang baru. Sehingga Pemisahan perseroan ini merupakan kebalikan dari penggabungan atau peleburan, dimana dalam hal ini yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu dari satu perusahaan menjadi dua atau lebih perusahaan.¹⁰

Pada awalnya, kelembagaan perbankan syariah dikembangkan melalui 2 (dua) konsep, yakni konsep *Office Channelling* dan konsep *Islamic Windows*. Kedua konsep tersebut bersifat sementara karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

¹⁰ Gunawan Widjaja, **150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas**, Cetakan ke-2, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 102.

maka persoalan kelembagaan perbankan syariah diatur melalui mekanisme baru, salah satunya dengan cara pemisahan. Pemisahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemisahan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pemisahan murni (*split up*) dan pemisahan tidak murni (*spin off*).

Kedua cara Pemisahan Perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki adanya suatu persamaan, selain itu juga memiliki suatu perbedaan. Persamaan konsep yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah terdapat suatu peralihan oleh hukum atas Aktiva dan Pasiva yang berasal dari Perseroan Terbatas yang melakukan Pemisahan. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada bagaimana eksistensi Perseroan Terbatas yang telah melakukan Pemisahan setelah dilakukannya pemisahan tersebut telah dilakukan. Pada cara yang pertama, yaitu Pemisahan murni atau disebut juga Pemisahan yang berakhir karena hukum. Sedangkan cara yang kedua, yaitu Pemisahan Tidak Murni yang berarti Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tidak berarti perseroan tersebut berakhir.

Dari sini timbul beberapa pertanyaan dan masalah, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan ‘beralih karena hukum’ pada peralihan aktiva dan pasiva. Kemudian, masalah yang kedua, Perseroan yang melakukan Pemisahan pada pemisahan murni tersebut berakhir karena hukum. Masalahnya disini adalah, apakah diperlukan suatu proses ataupun mekanisme tertentu sebagaimana yang harus dilakukan pada pembubaran ataupun pengakhiran pada suatu Perseroan Terbatas. Hal ini menyangkut pula status badan hukum Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Dengan berakhirnya suatu Perseroan Terbatas maka berakhir pula status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut. Sangat disayangkan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan secara detail apakah memang diperlukan suatu proses tertentu berkaitan dengan berakhir karena hukum dalam masalah pemisahan ini.

Oleh karena itu, hal seperti ini dapat melahirkan perbedaan persepsi pada pelaksanaannya nanti, apalagi peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Kemudian timbul pertanyaan, apakah Pemegang Saham atas Perseroan hasil Pemisahan tersebut tetap sama dengan Pemegang saham Perseroan yang melakukan pemisahan, mengingat hal ini tidak diatur baik didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, 1) Bagaimana Mekanisme Pemisahan Perseroan dalam hal Restrukturisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ? 2) Apa akibat hukum Pemisahan Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?

Pembahasan

A. Mekanisme Pemisahan Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan Syariah

1. Undang-undang perseroan terbatas

Pemisahan Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara-cara Pemisahan tersebut diatur dalam Pasal 135 ayat 1 UUPT yaitu Pemisahan Murni dan Pemisahan Tidak Murni

Supaya perbuatan hukum Pemisahan sah, harus memenuhi ketentuan Pasal 127 UUPT. Prosedur Pemisahan Perseroan pada dasarnya mengikuti ketentuan yang mengatur Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan. Atas dasar ketentuan tersebut, proses Pemisahan Perseroan dilakukan dengan langkahlangkah seperti dijelaskan di bawah ini:

¹¹ Sandi Suwardi, **Pemisahan Usaha dalam Kerangka UUPT**, <http://sandi-suwardi.blogspot.com/2009/02/pemisahan-usaha-dalam-kerangka-uu-pt.html>, diakses 2 Maret 2015, pukul 14.00 WIB.

a. Persiapan pemisahan perseroan¹²

Apabila suatu Perseroan berencana untuk melakukan Pemisahan, maka keputusan akhir untuk melakukan Pemisahan Perseroan tersebut menjadi kewenangan RUPS. Namun sebelum diselenggarakan RUPS yang secara khusus membicarakan Pemisahan Perseroan, berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UUPT Direksi Perseroan yang akan melakukan Pemisahan wajib:

- a) Menyusun Rancangan Pemisahan Perseroan.
- b) Rancangan Pemisahan Perseroan tersebut harus diumumkan:
 - 1) Dimuat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar secara nasional;
 - 2) Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan;
 - 3) Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
 - 4) Dalam pengumuman tersebut harus disertakan klausula yang menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pemisahan Perseroan di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.

Hal tersebut diatas harus dilakukan oleh Perseroan yang akan melakukan Pemisahan karena perbuatan hukum Pemisahan tersebut wajib memperhatikan kepentingan.¹³

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dengan dilakukannya pengumuman atas Rancangan Pemisahan oleh Direksi Perseroan maka:

- a. Perseroan yang dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui mekanisme *derivative action*. Sebagaimana diketahui bahwa Direksi mempunyai semacam *fiduciary duty* kepada Perseroan

¹² Tri Budiyo, **Hukum Perusahaan**, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 229.

¹³ Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

yang dipimpinnya. Apabila direksi melanggar *fiduciary duty* tersebut, khususnya jika dia lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi.¹⁴ Pihak pemegang saham dapat mewakili Perseroan untuk menggugat Direksi tersebut. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan tersebut disebut dengan Gugatan Derivative atau *Derivative Action*. Adapun pengertian dari *Derivative Action* tersebut adalah suatu gugatan yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan mana diajukan terhadap pihak lain.¹⁵

- b. Pemegang saham (minoritas) yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pemisahan, hanya boleh menggunakan haknya untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPT, maka Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga.
- c. Bagi karyawan perlu diperhatikan bahwa secara umum, dalam hal terjadinya pengalihan kepemilikan saham maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
- d. Kreditur yang keberatan terhadap rancangan Pemisahan Perseroan dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jangka waktu mengajukan keberatan paling lambat adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman di surat kabar harian;
 - b) Apabila dalam jangka waktu tersebut, kreditur tidak mengajukan keberatan, maka dia dianggap menyetujui Pemisahan Perseroan;
 - c) Jika keberatan kreditur tidak bisa diselesaikan oleh Direksi, maka penyelesaian tersebut diserahkan kepada RUPS Perseroan;
 - d) Kreditur berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

¹⁴ Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

¹⁵ Munir Fuady, **Doktrin-doktrin dalam corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 75.

- e) Selama penyelesaian keberatan Kreditur belum tercapai, Pemisahan belum dapat dilakukan.

b. Pemisahan perseroan harus berdasarkan RUPS

RUPS mengenai Pemisahan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 89 UUPT. Hal yang harus diperhatikan dalam RUPS yang membicarakan Pemisahan Perseroan adalah perihal kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUPT. RUPS ini harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham dengan hak suara hadir harus menyetujui keputusan Pemisahan Perseroan.

Mengenai cara pengambilan keputusan yang disebutkan di atas, menurut Pasal 127 ayat (1) UUPT harus terlebih dahulu diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPT sebelum dilakukan voting.¹⁶ Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diupayakan pengambilan keputusan RUPS melalui cara musyawarah untuk mufakat, sehingga keputusan yang diambil merupakan persetujuan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

c. Tindakan pemisahan perseroan

Perbuatan Hukum untuk melakukan Pemisahan Perseroan dapat dilakukan setelah tidak ada halangan yang sah untuk melakukan keberatan. Tindakan ini pada dasarnya mencakup pendirian Perseroan Baru dan sekaligus memisahkan aktiva dan pasiva Perseroan yang telah ada.

d. Rancangan pemisahan dituangkan dalam suatu akta notaris

Apabila RUPS telah mengesahkan Rancangan Pemisahan Perseroan, maka harus ditindaklanjuti dengan menuangkan Rancangan Pemisahan ke dalam Akta Pemisahan yang bersifat notariil dalam bahasa Indonesia.¹⁷

¹⁶ Harahap, *Op.cit.*, hlm. 523.

¹⁷ Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

2. Peraturan perbankan

2.1. Undang-undang perbankan syariah

Dalam rangka Pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Syariah dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia

Direksi Bank selaku organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pengurusan terhadap Perseroan, sebelum Pemisahan dilakukan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip kepada Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 (a) PBI 11/10/PBI/2009 yang menyatakan bahwa Pemberian izin pendirian Bank Umum syariah hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama yaitu persetujuan prinsip yang berisi persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank Umum Syariah dengan menyertakan Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah dan telah memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan. Sedangkan tahap yang kedua adalah pemberian izin usaha yang diberikan Bank Indonesia setelah Bank Umum Syariah hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

Rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan wajib disertakan bersamaan dengan permohonan persetujuan prinsip yang diajukan oleh Bank Syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 (1) PBI 11/10/PBI/2009 bahwa Rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah Hasil pemisahan, memuat paling kurang:

- a) Nama dan tempat kedudukan Bank Umum
- b) kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) modal disetor paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- d) ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- e) ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- f) ketentuan rapat umum pemegang saham Bank Umum Syariah yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- g) ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Kewajiban Direksi Bank yang akan melakukan pemisahan untuk memberikan Penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah diatur dalam Pasal 47 (2) PBI 11/10/PBI/2009 yang menyatakan bahwa:

Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan.

Pemohonan persetujuan prinsip yang disertai dengan Rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan serta penjelasan mengenai seluruh rencana pendirian Bank Umum Syariah, diajukan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia.

Sebagai jawaban atas permohonan Direksi Bank tersebut, maka Bank Indonesia akan menerbitkan Persetujuan Prinsip kepada Bank untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariahnya.

b. Permohonan persetujuan pemisahan kepada dewan komisaris

Selanjutnya Direksi Bank yang akan melakukan pemisahan, menyampaikan surat kepada Dewan Komisaris perihal permohonan Persetujuan Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan pendirian Bank Umum Syariah.

Kemudian Dewan Komisaris memberikan surat persetujuan sebagai jawaban dari surat Permohonan yang telah diajukan Direksi Bank yang akan

melakukan pemisahan tersebut yang mana isinya memberikan persetujuan sehubungan dengan transaksi pemisahan/ *spin-off* Unit Usaha Syariah.

c. Pengumuman ringkasan rancangan pemisahan dan pengumuman kepada pegawai bank yang akan melakukan pemisahan

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka selanjutnya Direksi Bank tersebut, menyusun Rancangan Pemisahan, Konsep Akta Pemisahan, rencana pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan, dan rancangan akta pendirian Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Ringkasan Rancangan Pemisahan tersebut diumumkan dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional. Pada pengumuman tersebut juga dilakukan pemberitahuan terhadap pegawai Bank yang akan melakukan pemisahan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT yang menyatakan sebagai berikut:

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat 4 UUPT yaitu 14 (empat belas) hari setelah Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan ternyata tidak ada keberatan yang diajukan, dari para kreditor Bank terhadap Rancangan Pemisahan dan Surat Pernyataan Direksi Bank yang keduanya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal yang ditentukan tidak ada keberatan dari pihak manapun atas Pengumuman tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, kreditor dianggap menyetujui Pemisahan.

d. Penyampaian agenda RUPS kepada Bapepam-LK

Apabila Bank yang ingin melakukan pemisahan adalah Perseroan Terbuka, maka Bank tersebut harus tunduk pada peraturan di bidang pasar modal, salah

satunya adalah peraturan Bapepam IX.I.1 Nomor Kep-60/PM/1996 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 peraturan Bapepam IX.I.1 bahwa “sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan.” Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Direksi Bank dapat mengajukan penyampaian agenda RUPS mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah kepada Bapepam- LK.

e. Pengumuman dan panggilan RUPS kepada para pemegang saham Bank

Selanjutnya Direksi Bank dapat melakukan Pengumuman dan Panggilan kepada para pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana di dalamnya dilakukan pembahasan mengenai Pemisahan.

Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan dalam bidang pasar modal yaitu peraturan IX.J.1 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Sehingga mengenai tata cara RUPS, Direksi Perseroan harus mematuhi peraturan IX.J.1 tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 huruf b IX.J.1 mengenai Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS bahwa:

- 1) Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
- 3) Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
- 4) Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di

kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Mengenai ketentuan kuorum dalam RUPSLB yang membahas mengenai Pemisahan, maka Bank Konvensional harus tunduk pada ketentuan dalam Pasal 89 (1) UUPT yang menyebutkan bahwa:¹⁸

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Selain itu juga tunduk pada ketentuan Pasal 15 huruf c ayat (3) IX.J.I sebagaimana dinyatakan bahwa “RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin a) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

¹⁸ Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

- c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

f. Penyelenggaraan RUPS

Dalam penyelenggaraan RUPSLB yang agendanya mengenai Pemisahan tersebut disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili, maka RUPSLB tersebut dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Pemisahan Unit Usaha Syariah, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Unit Usaha Syariah beralih karena hukum kepada Bank Umum Syariah yang akan didirikan guna menerima pemisahan usaha atau pengalihan aktiva dan pasiva tersebut;
- 2) Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pendirian Bank Umum Syariah dan Konsep Akta Pemisahan yang berisikan pokok isi semua hal, termuat dalam Rancangan Pemisahan;
- 3) Pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut berlaku efektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Bank Indonesia dan Bapepam-LK;
- 4) Pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi bank untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan ketentuan perundangundangan yang berlaku, termasuk untuk menuangkan Konsep Akta Pemisahan yang telah disetujui dalam RUPSLB ini ke dalam Akta Pemisahan yang akan ditandatangani di hadapan Notaris.

g. Pengumuman rencana pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah

Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB, Direksi Bank melakukan pengumuman mengenai Rencana Pengalihan Hak dan Kewajiban Unit Usaha Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009, yang mengatakan bahwa: Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.

h. Proses pemisahan unit usaha syariah

1) Penandatanganan akta pemisahan unit usaha syariah

Bahwa untuk melaksanakan Pemisahan (*spin-off*), perlu dibuat Akta Pemisahan dihadapan Notaris sebelum diperolehnya Persetujuan Prinsip. Akta Pemisahan tersebut berisi perjanjian antara Bank dengan Pendiri Perseroan untuk melakukan Pemisahan.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank untuk memisahkan Unit Usaha Syariah yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva yang tercatat pada neraca Unit Usaha Syariah beralih karena hukum kepada Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pemisahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud aktiva dan pasiva adalah seluruh aktiva dan pasiva Unit Usaha Syariah yang dimiliki atau menjadi tanggungan dan beban Unit Usaha Syariah sebagaimana termuat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah, yang dengan Pemisahan berdasarkan Akta Pemisahan, pada saat efektifnya pemisahan akan beralih karena hukum kepada Bank Syariah termasuk tetapi tidak terbatas.

2) Penandatanganan akta pendirian bank syariah hasil pemisahan

Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, yaitu dalam PBI Tahun 2009 Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Umum Konvensional dapat melakukan pemisahan terhadap Unit Usaha Syariah dengan cara:

- a) Mendirikan Bank Umum Syariah baru, atau;
- b) Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

Jika RUPSLB telah diputuskan bahwa cara pemisahan Unit Usaha Syariah adalah dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru, maka Pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) butir a PBI Tahun 2009. Dalam hal Para pendiri Bank Syariah telah sepakat dan setuju untuk mendirikan Bank Umum Syariah maka selanjutnya dilakukan pemberian nama pada Bank Syariah tersebut,.

Menurut ketentuan pasal 9 ayat 3 UUPT, dalam hal pengajuan permohonan pemakaian nama, bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pemakaian nama yang diajukan kepada Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui jasa teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum, maka pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris. Namun, dalam prakteknya yang bisa mengakses ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum adalah hanya Notaris, sehingga hanya Notarislah yang bisa mengajukan pemakaian nama tersebut dalam kapasitasnya selaku kuasa dari pendiri atau kuasa dari Direksi Perseroan.

Dalam Pemakaian nama juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 UUPT, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”;
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pemakaian nama, Bank Syariah ini harus terdapat Pencantuman frase “Syariah” pada penulisan nama Bank Umum Syariah yang baru didirikan adalah guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 angka 4 UU Syariah yang menyebutkan bahwa “Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya”.

Selanjutnya mengenai tempat kedudukan dari Bank Syariah hasil pemisahan harus menentukan dimana tempat kedudukannya. Tempat kedudukan berfungsi sebagai “kantor pusat” dan domisili dalam rangka melakukan komunikasi dan pemberitahuan kepada Perseroan. Sehingga, tempat kedudukan merupakan dasar eksistensi hukum Perseroan, karena adanya tempat dan kedudukan yang menjadi domisili Perseroan, pihak lain dapat menentukan di tempat mana dapat dilakukan komunikasi dengan Perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa tempat kedudukan mengandung berbagai makna yuridis yaitu:¹⁹

- a. Tempat kedudukan merupakan domisili hukum yang sah dari Perseroan;
- b. Tempat kedudukan merupakan yurisdiksi hukum bagi Perseroan melakukan kegiatan usaha;
- c. Tempat kedudukan merupakan landasan komersial bagi Perseroan melakukan kegiatan komersial;
- d. Tempat kedudukan, merupakan tempat utama bagi perseroan mengatur pelaksanaan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Tempat Kedudukan Perseroan wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UUPT yang mengatakan bahwa Perseroan mempunyai

¹⁹ Harahap, *Op.Cit.*, h1m 03-104.

tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan menurut Pasal 17 ayat 2 UUPt tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Berkaitan dengan pendiri perseroan, syarat pendiri Perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih, diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UUPt. Pengertian “pendiri” menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan Perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan perundang-undangan. Jadi syarat pertama untuk mendirikan Perseroan adalah pendiri Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang.²⁰ Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

Cara mendirikan perseroan oleh para pendiri, dilakukan berdasarkan perjanjian. Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UUPt yang mengatakan bahwa Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri berdasarkan perjanjian. Berarti pendirian Perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, di mana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.²¹

Dengan demikian, pendirian perseroan, tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian, yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas Bagian Pertama tentang Ketentuan Umum (Pasal 1313- 1318), Bagian Kedua tentang Syarat Sahnya Persetujuan, serta Bab Ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338-1341).

Adapun yang dimaksud dengan “orang” seperti yang dikemukakan di atas merujuk pada Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPt bahwa “orang” adalah:

a. Orang perorangan (*natuurlijke person, natural person*) yakni perorangan atau pribadi. Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau;

²⁰ *Ibid.*, hlm 162.

²¹ *Ibid.*, hlm 163.

b. Badan hukum (*recht persoon, legal person or legal entity*). Baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UUPM bahwa cara mendirikan Perseroan harus dibuat secara tertulis yaitu berbentuk Akta Notaris dan tidak boleh berbentuk akta di bawah tangan. Keharusan Akta pendirian harus berbentuk Akta Notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat atas perjanjian pendirian Perseroan, tetapi juga berfungsi sebagai syarat dalam mendirikan Perseroan.²²

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 UUPM, Akta Pendirian harus memuat Anggaran Dasar Perseroan yang rumusan dan ketentuannya telah disepakati oleh para pendirinya dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, Anggaran dasar Perseroan wajib memuat sekurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Kemudian, dalam Anggaran Dasar Bank Syariah hasil pemisahan wajib menyebutkan besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 2 PBI tahun 2009 menyebutkan bahwa “Modal disetor pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)”.

Dalam Akta Pendirian Bank Syariah hasil pemisahan juga harus dicantumkan mengenai maksud dan tujuan Bank Syariah tersebut. Ketentuan

²² *Ibid.*, hlm 168-169.

mengenai maksud dan tujuan ini diatur dalam Pasal 2 UUPT yang menyebutkan bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum disebut “klausul obyek”. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dianggap cacat hukum, sehingga keberadaannya tidak valid.

Akta Pendirian yang tidak memuat Anggaran Dasar tidak memenuhi syarat material, oleh karena itu Akta Pendirian tersebut meskipun berbentuk Akta notaris, tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi pengesahan Perseroan sebagai badan hukum. Selain memuat anggaran Dasar, dalam Akta pendirian juga harus memuat mengenai keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 UUPT antara lain seperti nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dari pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.

Lahirnya Perseroan sebagai badan hukum diwujudkan melalui proses hukum. Proses lahirnya sebuah badan hukum mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada ketentuan Pasal 7 ayat 4 UUPT yang menyebutkan bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Bertitik tolak dari ketentuan ini, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum harus mendapat pengesahan dari Menteri. Pengesahan dari Menteri diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Selanjutnya, Akta Pendirian Bank Syariah harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Bank Syariah tersebut telah resmi akan menjadi badan hukum pada saat diterbitkannya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas.

Namun, apabila dilihat dari ketentuan dalam Pasal 46 huruf b Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009, bahwa Bank Umum Syariah hasil pemisahan baru bisa memulai usahanya setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia. Sedangkan

izin usaha tersebut diajukan oleh direksi Bank Syariah paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia disertai akta pendirian dari Bank Syariah.

2. Akibat hukum pelaksanaan pemisahan perseroan terbatas ditinjau berdasarkan undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang perbankan syariah.

2.1. Akibat hukum pemisahan perseroan terbatas berdasarkan undang-undang perseroan terbatas.

Ada dua jenis pemisahan yang dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta akibat hukumnya, yaitu pemisahan yang dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pemisahan Murni, yaitu pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.
- 2) Pemisahan tidak murni, yaitu pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Disamping kedua jenis pemisahan tersebut, dalam praktik dikenal juga :

- 1) Pemisahan Hibrida, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada Perseroan lain yang didirikan dalam rangka pemisahan dan Perseroan yang melakukan pemisahan tidak menjadi berakhir karena hukum, namun menjadi pendiri Perseroan yang baru didirikan tersebut.
- 2) Pemisahan Pemegang saham, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada dua atau lebih perseroan lain, masing-masing pemegang saham menjadi pemegang saham

dari tiap-tiap perseroan yang didirikan dalam rangka pemisahan, dan Perseroan yang melakukan pemisahan menjadi berakhir karena hukum.

- 3) Pemekaran Usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum kepada Perseroan lain yang didirikan dalam rangka pemisahan, semua pemegang saham Perseroan yang melakukan Pemisahan tetap menjadi pemegang saham dari Perseroan yang didirikan dalam rangka pemisahan secara proporsional, dan Perseroan yang melakukan pemisahan tidak menjadi berakhir karena hukum.

2.1. Akibat hukum pemisahan perseroan berdasarkan undang-undang perbankan syariah.

Terhitung sejak berlaku efektifnya pemisahan pada saat Bank Syariah melakukan usahanya, maka akibat dari pemisahan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. semua Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah pada saat berlaku efektifnya Pemisahan beralih karena hukum kepada dan menjadi hak/kepunyaan serta kewajiban/beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan Bank Syariah selaku perseroan yang menerima Pemisahan;
- b. semua hak, piutang, wewenang dan kewajiban Unit Usaha Syariah berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum berlaku efektifnya Pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva Unit Usaha Syariah, serta semua hubungan hukum antara Unit Usaha Syariah dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh Bank Syariah atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan Bank Syariah.

Simpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka Penulis menemukan perbedaan mengenai Mekanisme pemisahan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketika Perseroan hasil Pemisahan lahir, maka Lahirnya perseroan sebagai badan hukum mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan

oleh Menteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4, yang mana setelah mendapatkan Keputusan pengesahan dari Menteri tersebut Perseroan baru hasil pemisahan bisa langsung menjalankan usahanya. Namun apabila dilihat dari Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 5 ayat 1, serta ketentuan dalam Pasal 46 huruf b Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009, menyatakan bahwa Bank Umum Syariah (Yang merupakan Perseroan Terbatas hasil Pemisahan dari Bank Konvensional) bisa memulai usahanya setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Jadi walaupun akta pendirian Bank Syariah sudah mendapat Keputusan pengesahan oleh Menteri, Bank syariah tidak dapat menjalankan usahanya sebelum memperoleh Izin dari Bank Indonesia berupa Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha.

2. Akibat Hukum Pemisahan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan dari cara pemisahannya terlebih dahulu, apakah Perseroan tersebut menggunakan Pemisahan dengan Cara Murni atau cara Tidak Murni, karena kedua cara pemisahan tersebut memiliki akibat yang berbeda. Sementara Akibat Hukum Pemisahan Perseroan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, mengakibatkan Semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah beralih karena hukum kepada Bank Syariah selaku perseroan yang menerima pemisahan, selain itu juga mengakibatkan semua hak, piutang, kewajiban, dan wewenang Unit Usaha Syariah karena hukum beralih kepada bank syariah dan menjadi tanggungan Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Widjaja, 2008, **150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas**, Cetakan ke-2, Forum Sahabat, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, **Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan 2**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuadi, 1996, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2009, **Perseroan Terbatas doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi**, Kreasi Tital Media, Yogyakarta.
- Tri Budiyo, 2011, **Hukum Perusahaan**, Griya Media, Salatiga.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang **Perbankan Syariah**.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang **Unit Usaha Syariah**.
- Peraturan Bapepam IX.I.1 Nomor Kep-60/PM/1996 tentang **Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham**.

Naskah Internet

- Sandi Suwardi, **Pemisahan Usaha dalam Kerangka UUPT**, <http://sandi-suwardi.blogspot.com/2009/02/pemisahan-usaha-dalam-kerangka-uu-pt.html>.
- Ali Rama, **Proyeksi Perbankan Syari'ah 2012**, <http://zonaekis.com/proyeksi-perbankan-syariah-2012>.